

**ANALISIS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI TERHADAP PELAKU USAHA KECIL MENENGAH DI
KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE**

Diajukan Oleh :

MARIAH ULFA M

4513011027



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri terhadap Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Mariah Ulfa M

Stambuk : 4513011027

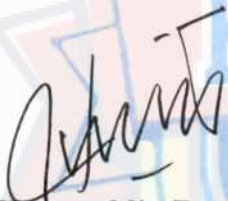
Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Telah disetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Hasanuddin Remmang, SE,M.Si



Rafiuddin, SE,M.Si

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Universitas Bosowa

**Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan**



Dr.H.A.Arifuddin Mane, SE,M.Si,SH,MH



Rafiuddin, SE,M.Si

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariah Ulfa M

Nim : 4513011027

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi

Judul : Analisis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
terhadap Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bontocani
Kabupaten Bone

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 17 Juli 2017



Mariah Ulfa M

**ANALISIS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI TERHADAP PELAKU USAHA KECIL MENENGAH di
KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE**

Oleh :

MARIAH ULFA M

Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa

ABSTRAK

MARIAH ULFA M.2017.Skripsi.Analisis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Terhadap Pelaku Usaha Kecil Menengah Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan di bimbing oleh Dr. Hasanuddin Remmang SE, M.Si dan Rafiuddin SE,M.Si. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Objek penelitian ini adalah masyarakat sebagai pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bontocani. Alat analisis yang digunakan adalah model analisis uji nyata (uji t) statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bantuan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone sehingga disarankan kepada pemerintah tetap menjalankan program bantuan tersebut.

Kata Kunci : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, Usaha Kecil Menengah

**NATIONAL PROGRAM ANALYSIS OF MANDIRI EMPOWERMENT PLANNING
ON MEDIUM SMALL ACTIVITY IN
BONTOCANI DISTRICT BONE DISTRICT**

by:

MARIAH ULFA M

Prodi Economic Development Faculty of Economics

University Bosowa

ABSTRACT

MARIAH ULFA M.2017.Skripsi. National Program Analysis Of Mandiri Empowerment Planning On Medium Small Activity In Bontocani District Bone District, South Sulawesi provinsi guided by Dr. Hasanuddin Remmang SE, M.Si dan Rafiuddin SE, M.Si. The purpose of this study is to determine the impact of the implementation of the National Program for Community Empowerment of Small and Medium Business Performers in Bontocani Sub-district, Bone District. The object of this research is the community as perpetrators of Small and Medium Enterprises in Bontocani Subdistrict. Analyzer used is real test analysis model (t test) statistic. The results of this study indicate that the funding program of the National Program for Community Empowerment Mandiri has a positive impact on the increase of income of small and medium business actors in Bontocani Sub-district, Bone District, so it is suggested to the government to keep running the aid program.

Keywords: National Program for Community Empowerment, Small and Medium Enterprises

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul *“Analisis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri terhadap Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone ”* dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Pertama – tama ucapan terima kasih penulis berikan kedua orang tua yaitu Bapak Muhammad dan Ibu Sriwahyuni yang telah membimbing penulis dari kecil dan selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun dalam menyelesaikan studi dan Adikku Ahmad Akbar Muhammad dan Rifky Riskullah Muhammad.
2. Kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr.Ir Saleh Pallu, M.Eng
3. Bapak Dr.H.A. Arifuddin Mane, SE,M.Si, SH, MH selaku Dekan fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
4. Ibu Dr.Hj.Herminawati Abu Bakar SE, MM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
5. Bapak Rafiuddin SE, M.Si selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.

6. Kepada Bapak Dr Hasanuddin Remmang SE, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Rafiuddin SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan kepada penulis selama menyusun skripsi.
7. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis Beserta seluruh Staf Fakultas ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan administrasi.
8. Terima kasih kepada Nisbah S.Ag, sebagai ibu kedua yang selalu memberikan dukungan selama menyelesaikan studi di Makassar.
9. Terima kasih untuk sepupu yang selalu meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan masalah selama perkuliahan (Anto).
10. Terima kasih kepada teman-teman Ekonomi Pembangunan Universitas Bosowa (Sarce Randa, Nikmawati, A.Hijrawati, Zaskia, Siti Sarina Sarif, Suhendra, Sutiawan, Tahir, Ridwansyah, Asdika AS, Sity Rahma Karengga, Zulkifli, Herlianti Rahman, Devi, Dila, Kanda Agustinus Risal, Kanda Fikri Arif, Kanda Mariko Efendi, Kanda Saddam Malik, dan yang lain yang tidak disebutkan satu persatu).
11. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bersama dari kecil sampai sekarang ini (Fatimah Azzahra, Wahyuni Mus, A. Nining Sulfiani, Riska Annisa, Mariana, A.Alfian, Muh. Fasli, Akmal)
12. Kepada staf Kantor Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat atas pemberian izin dan telah meluangkan waktu kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, amin ya Rabbal alamin.

Makassar, 17 Juli 2017

Mariah Ulfa M



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kegunaan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Kerangka Teori	4
2.1.1 Pengertian Usaha Kecil Menengah.....	4
2.1.2 Batasan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah	8
2.1.3 Ciri-ciri umum UKM.....	9
2.1.4 Pemberdayaan Dalam Ekonomi.....	11
2.1.5 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	16
2.1.6 Manfaat dan Hambatan Pemberdayaan Masyarakat.....	22
2.1.7 Prinsip Dasar PNPM Mandiri	27
2.1.8 Tujuan PNPM Mandiri	29
2.1.9 Strategi PNPM Mandiri	30
2.1.10 Teori Pendapatan	31
2.2 Kerangka Pikir	36
2.3 Hipotesis	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1 Daerah Penelitian.....	37

3.2 Metode Pengumpulan Data.....	37
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.3.1 Jenis Data.....	38
3.3.2 Sumber Data	39
3.4 Teknik Penentuan Sampel	39
3.5 Metode Analisis	40
3.6 Defenisi Operasional.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	43
4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	43
4.2 Deskripsi Data.....	46
4.2.1 Identifikasi Responden	47
4.2.1.1 Umur Responden	47
4.2.1.2 Jenis Kelamin.....	48
4.2.1.3 Pendidikan Responden.....	49
4.2.2 Analisis Uji Peningkatan Pendapatan Pelaku UKM.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 KERANGKA PIKIR	36
GAMBAR 3.1 UJI T	41
GAMBAR 4.1 KRITERIA PENERIMAAN DAN PENOLAKAN HIPOTESIS NOL TERHADAP PENDAPATAN UKM.....	61



DAFTAR TABEL

TABEL 4.1	PENDUDUK KECAMATAN BONTOCANI MENURUT DESA	45
TABEL 4.2	JUMLAH RESPONDEN MENURUT UMUR PADA USAHA KECIL MENENGAH	48
TABEL 4.3	JUMLAH RESPONDEN MENURUT JENIS KELAMIN PADA USAHA KECIL MENENGAH	49
TABEL 4.4	JUMLAH RESPONDEN MENURUT PENDIDIKAN PADA USAHA KECIL MENENGAH	50
TABEL 4.5	JAWABAN RESPONDEN TERKAIT DENGAN KETEPATAN SASARAN PEMBERIAN BANTUAN.....	51
TABEL 4.6	JAWABAN RESPONDEN TERKAIT DENGAN ADA TIDAKNYA SOSIALISASI DARI PEMERINTAH	52
TABEL 4.7	JAWABAN RESPONDEN TERKAIT DENGAN PENGETAHUAN TERHADAP TUJUAN PNPM.....	53
TABEL 4.8	JAWABAN PEMANFAATAN BANTUAN DANA PNPM	55
TABEL 4.9	JAWABAN RESPONDEN TERKAIT ADA TIDAKNYA PEMANTAUAN DARI PEMERINTAH	56
TABEL 4.10	JAWABAN RESPONDEN TERKAIT DENGAN ADA TIDAKNYA TANGGAPAN DARI PEMERINTAH TERHADAP KELUHAN MASYARAKAT YANG MENERIMA BANTUAN PNPM	57
TABEL 4.11	JAWABAN RESPONDEN TERKAIT DENGAN MENINGKAT ATAU MENURUNNYA PENDAPATAN	58
TABEL 4.12	JAWABAN RESPONDEN TERKAIT DENGAN TINGKAT PENDAPATAN SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA BANTUAN PNPM	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007.

Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri tahun 2007 dimulai dengan dua program pemberdayaan masyarakat, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pemberdayaan masyarakat di pedesaan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan.

Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahap kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan

pengelolaan dana sesuai kebutuhan prioritas di desa masing-masing hingga pelaksanaan dan pemeliharannya.

Jumlah dana yang disalurkan oleh pemerintah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam kurun waktu tiga tahun terakhir adalah, selama tahun 2014 jumlah dana yang disalurkan pemerintah di Kecamatan Bontocani sebesar Rp 3.674.500.000 dengan jumlah unit usaha sebanyak 360 sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp 1.782.000.000 dengan jumlah unit usaha sebanyak 170 dan tahun 2016 sebesar Rp 3.327.000.000 dengan jumlah unit usaha sebanyak 492.

Dengan mengangkat judul penelitian **“Analisis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri terhadap Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone”** sebagai pijakan awal dari sebuah penalaran lebih lanjut untuk lebih memperhatikan kondisi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) demi tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat terhadap peningkatan pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dampak pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk kalangan mahasiswa maupun pihak yang terkait. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan sebagai bahan referensi yang tertarik dalam bidang kajian ini.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan tentang keberlanjutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, khususnya PNPM Mandiri di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Usaha Kecil Menengah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tak lepas dari peran penting UKM dalam meningkatkan dan menstabilkan perekonomian. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi semangat "keadilan sosial" sebagaimana yang termaktub dalam sila ke lima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia". Jika di runut dalam sejarahnya UKM sebagai motor penggerak perekonomian mampu bertahan dari krisis moneter tahun 1997 sampai tahun 1998 dan sampai saat ini UKM masih memperlihatkan eksistensinya, dan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat ekonomi ke bawah. Hal tersebutlah yang harus di contoh oleh Indonesia dalam meningkatkan jumlah dan para pelaku UKM. Di mana UKM itu sendiri lebih bersifat kepada sektor rill sehingga masyarakat lebih merasakan manfaatnya secara langsung yang berimbas kepada sejahteranya masyarakat.

Pengembangan ekonomi kerakyatan tidak hanya tidak dapat di capai hanya dengan mengandalkan startegi pertumbuhan, di mana telah terbukti bahwa dampak kebijakan yang hanya mengandalkan pertumbuhan, justru akan menimbulkan kesenjangan sosial. UKM sangat diharapkan menjadi salah satu pilar penting dalam memajukan perekonomian di indonesia. pertumbuhan di indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada pelaku UKM, menurut data Bank Indonesia setiap tahunnya kredit UKM semakin meningkat. menyadari pentingnya dan besarnya manfaat dengan hadirnya

para pelaku UKM dalam memberikan sumbangsih positifnya dalam memajukan roda perekonomian Indonesia.

Ada beberapa BUMN ikut serta bersinergi dalam membantu mendorong peningkatan UKM di Indonesia. PT.Asuransi Jiwasraya, Jamkrindo serta PT.Permodalan Nasional Madani berkomitmen untuk mendukung para pelaku UKM. Dengan adanya sinergitas yang terjalin, dapat berdampak positif lebih lanjut bisa turut andil dalam menekan angka kemiskinan. sebagai gambaran, kendati Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) telah diberlakukan pada tahun 2016, tentunya para pelaku UKM akan semakin dituntut untuk terus berinovasi agar bisa bersaing dengan para pengusaha dari negara ASEAN lainnya. Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan dalam menyokong pertumbuhan UKM supaya tidak sampai atau banyak yang tumbang.

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peran yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Bisnis UKM sudah tersebar hampir di seluruh pelosok negeri, UKM telah terbukti mampu menopang sendi-sendi perekonomian bangsa di masa sulit saat terjadi krisis moneter yang meluluhlantahkan perekonomian Indonesia, di mana saat krisis moneter menerjang Indonesia, perusahaan-perusahaan besar tak mampu terselematkan yang terjadi justru penggelapan dana BLBI, dana bantuan dari pemerintah tak jelas kemana.

Kepedulian pemerintah terhadap UKM sangat tepat, terutama pada fokus pengembangan di sektor riil, UKM lebih bermain di sektor riil yang memenuhi

hajat hidup orang banyak sehingga memiliki manfaat tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi tetapi juga mampu mensejahterakan masyarakat. UKM juga merupakan solusi bagi masyarakat yang ingin berwirausaha sebagai cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar, hampir semua usaha besar berasal dari UKM, satu hal yang perlu diingat, bahwa dalam pengembangan UKM merupakan suatu langkah yang perlu diambil oleh pemerintah yang merupakan tanggung jawab pemerintah, selain itu, peran sektor perbankan juga sangat penting terkait dengan memajukan UKM itu sendiri, lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau modal tidak dapat di kesampingkan, pemerintah harus mencari solusi terbaik mengenai keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha UKM, yakni akses pasar, modal, serta teknologi.

Prospek bisnis UKM dalam era Masyarakat Ekonomi Asean sangat tergantung dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan bisnis UKM, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi UKM, dalam artian suatu faktor penting yang mampu mengurangi daya saing UKM adalah merebaknya pungutan liar yang dikenakan pejabat aparat pemerintah, dengan demikian pungutan liar maupun beban fiskal yang memberatkan perkembangan UKM. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki banyak manfaat bagi pertumbuhan perekonomian, oleh karena itu, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, banyak usaha besar yang mengalami stagnansi bahkan gulung tikar, sektor usaha UKM mampu unjuk gigi ditengah pergumulan krisis moneter pada tahun 1997/1998.

Usaha kecil dan menengah (UKM) seringkali diartikan sebagai sebuah unsur mikro dalam perekonomian. Dalam menjalankan ekonomi kerakyatan tentunya hal ini menjadi asas fundamental dalam penguatan ekonomi. Usaha kecil menengah atau yang biasa juga disebut sebagai sektor informal sering dikaitkan dengan ciri-ciri utama pengusaha dan pelaku sektor informal, antara lain: kegiatan usaha bermodal utama pada kemandirian rakyat, memanfaatkan teknologi sederhana, pekerjaannya terutama berasal dari tenaga kerja keluarga tanpa upah, bahan baku usaha kebanyakan memanfaatkan sumber daya lokal, sebagian besar melayani kebutuhan rakyat kelas menengah kebawah, pendidikan dan kualitas sumber daya pelaku tergolong rendah.

Namun di dalam kesepakatan Menko Kesra dengan Bank Indonesia (BI) mendefinisikan UKM berdasarkan UU No.9 Tahun 1995 dan Instruksi Presiden No.10 Tahun 1999, secara spesifik didefinisikan sebagai berikut :

1. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 dan milik warga negara Indonesia.
2. Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan, berdiri sendiri, serta usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum dan merupakan milik warga negara Indonesia.

Menurut M. Kwartono Adi (2007:12) mendefinisikan usaha kecil adalah sebagai berikut: Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- dan milik Warga Negara Indonesia.

Menurut Ina Primiana (2009:11) mendefinisikan usaha kecil adalah sebagai berikut

1. Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (*core business*) yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan bisnis kelautan.
2. Pengembangan kawasan andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah, yaitu dengan pemilihan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor dan potensi.
3. Peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.

2.1.2 Batasan Usaha kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah

Berdasarkan literatur perbedaan berbagai kategori usaha didasarkan pada aset, jumlah pekerja dan omset. Masing-masing lembaga membuat kriteria berbeda disesuaikan dengan kepentingan mereka. Paling tidak ada 5 sumber yang dapat dipakai sebagai acuan, yaitu ; Undang-Undang nomor 9 tahun 1999 tentang usaha kecil, BPS, Menteri Negara dan Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, dan Bank Dunia. UU No.9 Tahun 1999 hanya memberi defenisi untuk usaha kecil saja dan mengabaikan usaha mikro dan usaha menengah.

Beberapa pernyataan terkait hal tersebut, seringkali para peminat studi kelompok Usaha Kecil dan Menengah mengkategorikannya dalam beberapa hal terkait penggunaan defenisi mengenai ini. Barangkali yang merancang undang-undang pada waktu itu membuat klarifikasi sederhana saja dengan mengelompokkan dua macam dunia usaha, yaitu usaha kecil dan usaha besar. Bank indonesia membuat defenisi yang lebih kualitatif untuk usaha mikro. Kriteria Bank Dunia lebih cocok dipakai di Amerika daripada di Indonesia. Hingga sekarang belum ada kategori baru yang dibuat oleh karena itu kategori yang masih berlaku.

2.1.3 Ciri-Ciri Umum UKM

Ada beberapa hal yang merupakan ciri UKM dan Usaha Mikro. Menurut Mintzberg (Husen, 2005) bahwa sektor usaha UKM sebagai organisasi ekonomi bisnis mempunyai beberapa karakter seperti :

1. Struktur organisasi yang sangat sederhana
2. Mempunyai kekhasan
3. Tidak mempunyai staf berlebihan
4. Pembagian kerja yang lentur
5. Memiliki hierarki manajemen yang sederhana
6. Tidak terlalu formal
7. Proses perencanaan sederhana
8. Jarang mengadakan pelatihan untuk karyawan
9. Jumlah karyawannya sedikit
10. Tidak ada pembedaan aset pribadi dan aset perusahaan

Zulkarnain (2006:125) mendefinisikan pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar rupiah.
3. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
4. Berbentuk badan usaha yang dimiliki perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

Berdasarkan penjabaran di atas UKM merupakan suatu unit organisasi yang sederhana karena lingkup usahanya terbatas maka UKM tidak menggunakan tenaga kerja secara berlebihan. Tenaga yang ada sering dimanfaatkan secara maksimal.

Hal ini bisa dilihat bahwa tenaga kerja di UKM dapat mengerjakan beberapa jenis pekerjaan yang berlainan. Dengan demikian mereka dapat menekankan biaya tenaga kerja. Biasanya tenaga kerja yang terlibat di UKM bisa bertahan lama karena hubungan yang dikembangkan di sana adalah pola kekeluargaan. Ini menjadi karakteristik UKM dimana hubungan antara pengusaha dan pekerja bersifat tidak formal. Walaupun kelihatan hubungan pengusaha UKM dengan tenaga kerja baik saja tidak berarti tidak ada masalah disana. Sering terjadi konflik tapi langsung dapat terselesaikan dengan sendirinya.

Tentunya beberapa pengertian tentang usaha kecil dan menengah di atas, terutama ciri-ciri yang disebutkan di atas tadi merupakan sebuah penggambaran mengenai UKM secara nasional. Namun tidak menutup kemungkinan di setiap daerah memiliki sebuah standar bila suatu usaha tersebut dapat dikatakan sebagai usaha kecil dan usaha menengah. Beberapa penjelasan memberikan penilaian terhadap usaha yang bergerak dalam keterbatasan modal dengan pekerja yang sedikit bahkan terdapat hubungan keluarga di dalamnya dan tentunya bergerak dalam industri rumah tangga, penunjang ekonomi kerakyatan di samping itu berkenaan dengan usaha yang bergerak pada sektor industri pengolahan dan perdagangan disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan hal lain yang memberikan perbedaan diantara keduanya hanyalah pendapatan atau omset serta produksi yang dilakukannya maka dapat dikategorikan sebagai usaha kecil dan usaha menengah.

Namun secara garis besar ciri-ciri Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bone khususnya di Kecamatan Bontocani digambarkan sebagai sebuah kekuatan ekonomi kerakyatan yang kemudian banyak bergerak dalam bidang perdagangan dan industri pengolahan dengan penggunaan teknologi yang masih sangat terbatas.

2.1.4 Pemberdayaan dalam ekonomi

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan adalah suatu istilah yang menunjukkan adanya suatu bentuk aktivitas untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas yang bermakna untuk membangun atau melaksanakan sesuatu secara baik. Wikipedia (2010:1) mendefinisikan pemberdayaan adalah proses berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Dalam konteks pemerintah pemberdayaan diartikan sebagai proses pembangunan di mana pemerintah berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan pemerintah hanya bisa terjadi apabila anggotanya ikut berpartisipasi. Istilah pemberdayaan dalam pembangunan selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakan pada kekuatan tingkat individu dan sosial.

Anomymous (2010:1) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya menempatkan pekerja untuk bertanggungjawab atas apa yang mereka kerjakan. Sehingga para manager belajar untuk berhentimengontrol, dan pekerja belajar bagaimana bertanggung jawab atas pekerjaannya dan bisa membuat keputusan yang tepat. Dengan demikian berarti memberi kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan gagasan baik dan mempunyai keterampilan mewujudkan gagasannya menjadi realitas.

Zunadi (2010:1) mengartikan pemberdayaan dalam konteks masyarakat sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui

pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Pemberdayaan menurut Suhendra (2006:74-75) adalah "suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi".

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai

pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa (Sumodiningrat, 2009:60).

Tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2009 : 60).

Sedangkan menurut Widjaja (2008:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga

masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut Sumaryadi (2007:11) pemberdayaan masyarakat adalah "upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan". Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi juga pada dasarnya sebagai berikut:

1. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Adisasmita (2006:35) pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan yang lebih efektif dan efisien, seperti:

- a. Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana,data, rencana, teknologi).
- b. Aspek proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan);
- c. Aspek keluaran (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi).

2.1.5 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Istilah konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya sesuatu yang dipahami. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan *penguatan modal social* (. Apabila kita sudah memiliki Kepercayaan (*trusts*), Patuh Aturan (*role*), dan Jaringan (*networking*)) modal social yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur (*direct*) masyarakat serta mudah mentransfer *knowledge* kepada masyarakat. Dengan memiliki modal social yang kuat maka kita akan dapat menguatkan *knowledge*, modal (*money*), dan *people*.

Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah Trasfer kekuasaan melalui penguatan modal social kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan sosial. Modal social yang kuat akan menjamin suistainable didalam membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (*how to build thr trust*).

Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal sosial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Terdapat 6 konsep pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat seperti yang dikutip oleh Mardi Yatmo Hutomo (2005:6), secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.

2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; b) penguatan kelembagaan; c) penguasaan teknologi; dan d) pemberdayaan sumberdaya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
5. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; d) penguatan industri kecil; e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan f) pemerataan spasial.

6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: a) peningkatan akses bantuan modal usaha; b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam memperluas kesempatan kerja, maka dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan UMKM terutama Usaha Kecil Menengah (UKM), memiliki potensi yang strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang dijalankan oleh UKM mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan.

Hal ini menunjukkan bahwa kelompok UKM dapat menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja. Berkaitan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka beberapa kegiatan pokok yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM terhadap UKM antara lain:

1. Program pengembangan sistem pendukung usaha UKM - Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini, yaitu: a) sumber pembiayaan, khususnya skim kredit investasi dan penyediaan skim pembiayaan ekspor melalui lembaga modal ventura dan lembaga non bank lainnya, terutama yang mendukung UKM; b) Penguatan jaringan pasar domestik produk-produk UKM melalui pengembangan lembaga pemasaran,

jaringan/kemitraan usaha, dan sistem transaksi usaha yang bersifat *on-line*, terutama bagi komoditas unggulan berdaya saing tinggi; c) Penguatan infrastruktur pembiayaan bagi petani dan nelayan di perdesaan dan pengembangan skim-skim pembiayaan alternatif seperti sistem bagi hasil dana bergulir, sistem tanggung renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan, penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas; d) Fasilitasi pengembangan skim penjaminan kredit melalui kerjasama bank dan lembaga asuransi, dan fasilitasi bantuan teknis kepada BPR dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk meningkatkan penyaluran kredit bagi sektor pertanian; e) Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin, melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dengan dukungan penyediaan infrastruktur perdesaan; f) Bantuan perkuatan untuk KSP/USP yang masih dapat melakukan kegiatan; g) Memfasilitasi UKM untuk dapat berdagang di pasar darurat yang disediakan Departemen Perdagangan.

2. Pemberdayaan usaha skala mikro - Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini, yaitu: a) Peningkatan kesempatan dalam berusaha dengan penyediaan kemudahan dan pembinaan teknis manajemen dalam memulai usaha, perlindungan usaha, tempat berusaha wirausaha baru, dan penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif untuk usaha; b) Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan perkoperasian serta fasilitasi pembentukan wadah koperasi di daerah kantong-kantong

kemiskinan; c) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan LKM dan KSP di sektor pertanian dan perdesaaan antara lain melalui pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan bank; d) Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas koperasi sebagai wadah organisasi untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dan efisiensi kolektif; e) Memfasilitasi sarana usaha bagi usaha skala mikro, yang berlokasi di sekitar tenda-tenda penampungan, dan pasar darurat yang pelaksanaan dikoordinasikan oleh Departemen Perdagangan; f) Peningkatan kredit skala mikro dan kecil serta peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan KSP/USP; g) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan pengusaha mikro dan kecil. (Wayan Suarja, 2007).

Salah satu hal yang dapat mendukung berkembangnya suatu UKM agar tercipta perekonomian yang kokoh adalah faktor modal. Hingga saat ini faktor modal berupa kredit usaha masih diusahakan pemerintah dan tercantum dalam kebijakannya. Seperti yang telah disebutkan dalam kebijakan pemerintah di atas, pemerintah melakukan kegiatan pokok di bidang permodalan di antaranya adalah memperluas, memperkuat, dan memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan serta meningkatkan kredit skala mikro dan kecil. Dengan demikian, permodalan menjadi faktor yang penting bagi kemajuan UKM dalam rangka menguatkan

ekonomi nasional meskipun dalam kenyataannya, beberapa pelaku UKM masih mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit tersebut.

2.1.6 Manfaat dan Hambatan Pemberdayaan Masyarakat

Program Pengembangan masyarakat biasanya dikaji dari sudut pandang ekonomi belaka. Hal ini memang penting, tetapi manfaat ekonomi hanya akan bisa berkelanjutan jika masyarakat sendiri memiliki dan mengelola kegiatan. Pendekatan pemberdayaan pada awalnya terpusat pada perubahan sosial dan organisasi yang dibutuhkan bagi masyarakat agar mampu memegang kendali. Ini akan mendukung:

- Peningkatan kesejahteraan jangka waktu panjang yang berkelanjutan
- Peningkatan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat dan kelompok dengan penghasilan kecil
- Peningkatan penggunaan sumber-sumber pengembangan secara efektif dan efisien
- Program pengembangan dan pemberian pelayanan yang lebih efektif, efisien dan terfokus pelanggan
- Proses pengembangan yang lebih demokratis

Hambatan-Hambatan pada Tingkat Kebijakan dan Lembaga Pelaksana

Hal-hal di bawah ini merupakan hambatan terhadap pengembangan atau pelaksanaan kebijakan yang mendukung atau memampukan Pemberdayaan Masyarakat:

Kurangnya Pemahaman atau Komitmen yang Sungguh-Sungguh

Walaupun sebagian besar pemegang kendali, termasuk penyusun kebijakan, dapat mendukung dasar-dasar Pemberdayaan Masyarakat dan memiliki pemahaman yang umum tentang persyaratannya, namun pembuat keputusan dapat kembali kependekatan *top-down*. Hal ini bisa terjadi karena kurang memahami bagaimana memberdayakan masyarakat, atau sudah memahami tetapi pada saat dimana terasa ada krisis dan/atau tekanan sulit dilakukan.

Hambatan Perilaku

Pegawai Negeri vs Pelayan Masyarakat, sebagian besar orang masih cenderung menganggap bahwa pegawai negeri - sesuai dengan namanya - dipekerjakan dan digaji oleh pemerintah. Walhasil, implikasi persepsi semacam ini adalah para pegawai negeri harus lebih mengutamakan kepentingan pemerintah jika diperhadapkan dengan kepentingan masyarakat. Padahal justru masyarakatlah klien sejati mereka. Belum ada suatu pengakuan bahwa gaji pegawai negeri berasal dari pajak yang dibayar masyarakat dan hasil pengolahan sumber daya yang merupakan milik masyarakat. Terlebih lagi kesadaran bahwa fungsi pertama dan utama pegawai negeri adalah sebagai pelayan masyarakat .

Hambatan Kebijakan Keuangan

Kekakuan sistem penganggaran proyek serta sistim pengawasan keuangan negara yang sangat kurang fleksibilitasnya dan lebih berfokus pada aspek administrasi dan pencapaian target fisik semata tanpa melihat proses yang terjadi. Selain itu pula, kelompok masyarakat kurang mengontrol penggunaan dana-dana pusat (DIP sektoral) dan dana transfer (seperti Inpres). Mungkin tidak cukup

dukungan keuangan bagi Pemberdayaan Masyarakat dari sumber-sumber daya lokal, baik disebabkan oleh rendahnya tingkat pemungutan pajak, rendahnya tingkat pengendalian 'dana hibah' dari pusat atau rendahnya tingkat komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumberdaya pemerintah setempat bagi usaha Pemberdayaan Masyarakat. Sumberdaya masyarakat sendiri dapat digerakkan sampai ke tingkat tertentu tapi nampaknya akan membuktikan rendahnya kualitas penanganan input dan dukungan.

Jangka Waktu yang di Butuhkan Bagi Perubahan di Tingkat yang Lebih Tinggi

Ada kecenderungan dari program-program Pemberdayaan Masyarakat untuk melupakan bahwa perubahan-perubahan di tingkat lokal itu jauh lebih mudah diperkenalkan, dan bahwa resistensi (penolakan) di tingkat yang lebih tinggi akan lebih besar sampai tingkat pemahaman dan komitmen yang tulus untuk berubah dapat diperkenalkan kepada penyusun kebijakan.

Diversifikasi Budaya, Ekonomi, Geografis, Suku Bangsa

Ada keprihatinan bahwa kebijakan yang dikembangkan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat tidak akan cukup fleksibel untuk mengakomodasi kondisi geografis, tingkat ekonomi dan budaya yang berbeda-beda. Harus diperhatikan bahwa kebijakan yang memungkinkan, tetapi tidak menghalangi proses adaptasi yang dibutuhkan untuk memastikan strategi Pemberdayaan Masyarakat yang tepat, diteruskan di tingkat lokal.

Struktur, Fungsi dan Perilaku Pelayanan Umum

Sistem perencanaan dan kepemimpinan pembangunan yang terpusat selama tiga puluh dua tahun, telah melahirkan tenaga pelayanan umum tingkat lapangan yang terbiasa mengikuti instruksi dari pusat. Akibatnya mereka tidak terlatih untuk mengembangkan, melaksanakan, mengevaluasi serta merubah suatu proyek di tingkat daerah. Inovasi dan pengambilan keputusan oleh staf tingkat lapangan tidak pernah dihargai; sehingga mereka mengalami kesulitan berperan sebagai fasilitator dalam kelompok masyarakat, yang kemudian mempromosikan dan mempertahankan kegiatan-kegiatan yang dihasilkan.

Kurangnya Data Monitoring dan Evaluasi yang Bermutu

Kualitas yang kurang baik dari umpan balik dan/atau arus informasi manajemen dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi sering ditemui. Mungkin ada keraguan dari lembaga-lembaga lokal untuk berbagi informasi tentang kelemahan program-program Pemberdayaan Masyarakat. Secara khusus mereka merasa bahwa informasi dapat digunakan untuk mengendalikan proses, bukan memfasilitasi dan mengembangkan dukungan kebijakan yang tepat. Hal ini dapat membawa ke situasi dimana kebijakan dan peraturan yang mendukung sulit atau tidak mungkin dikembangkan karena pendekatan-pendekatan yang berhasil belum dievaluasi dan pelajaran yang dipetik tidak dikomunikasikan kepada tingkat penyusun kebijakan dan pembuat keputusan. Dibutuhkan perubahan besar pada fokus dari program Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan diletakkannya penekanan yang lebih banyak pada dinamika Pemberdayaan Masyarakat dan lebih sedikit pada sasaran produksi.

Indikator yang Tidak Tepat

Orientasi Pemberdayaan Masyarakat selama ini selalu diukur dalam bentuk fisik, komoditas, dan diukur dari sisi input dan kualitatif, daripada non-fisik dengan ukuran keberhasilan dari dampak dan proses. Kebanyakan program Pengembangan Masyarakat berorientasi fisik dan komoditas. Indikator keberhasilan diukur dari realisasi input berdasarkan kuantitas daripada orientasi non-fisik dengan ukuran dampak dan proses.

Sistem administrasi yang terlalu birokratis

Adanya berbagai peraturan hukum yang mengatur mengenai Program Pengembangan Masyarakat yang kaku yang didasarkan pada Surat Keputusan (SK), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) juga sistem penganggaran. Hal ini menyebabkan sulitnya petugas lapang berhadapan dengan kenyataan yang membutuhkan fleksibilitas. Akibatnya, tujuan PM (pemberdayaan atau pengembangan masyarakat) sulit dicapai karena orientasi petugas lebih kepada mengikuti peraturan daripada menjawab kebutuhan di lapangan.

Kurangnya Koordinasi Program/Proyek pada Tingkat Internal atau Antar Sektor

Program/proyek lain (pada instansi yang sama atau instansi yang berbeda) sering menggunakan pendekatan yang bertentangan dengan pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, sehingga bisa mempengaruhi proses implementasi Pemberdayaan Masyarakat di tingkat masyarakat atau lembaga sendiri.

2.1.7 Prinsip Dasar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini:

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- b. Otonomi. Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
- c. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- d. Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
- e. Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.

- f. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
- g. Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- h. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
- i. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
- j. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- k. Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

2.1.8 Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

2.1.8.1 Tujuan Umum

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

2.1.8.2 Tujuan Khusus

- a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.
- c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
- d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- e. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.

- g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

2.1.9 Strategi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

2.1.9.1 Strategi Dasar

- a. Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
- b. Menjalinkan kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.
- c. Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif.

2.1.9.2 Strategi Operasional

- a. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis.
- b. Menkuatkan peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya;
- c. Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel.
- d. Mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas.

- e. Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya.
- f. Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan dinamis serta berkelanjutan.

2.1.10 Teori Pendapatan

2.1.10.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan berasal dari kata dasar “dapat”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Pengertian pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan definisi pendapatan secara umum. Pada perkembangannya, pengertian pendapatan memiliki penafsiran yang berbeda-beda tergantung dari latar belakang disiplin ilmu yang digunakan untuk menyusun konsep pendapatan bagi pihak-pihak tertentu.

Setidaknya terdapat dua disiplin ilmu yang memiliki penafsiran tersendiri mengenai pengertian pendapatan. Disiplin ilmu yang pertama adalah Ilmu Ekonomi sedangkan yang kedua adalah disiplin Ilmu Akuntansi. Pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi adalah nilai maksimum yang dapat dikonsumsi seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pengertian pendapatan menurut

Ilmu Ekonomi adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.

Pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara sederhana, pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.

Menurut John J. Wild (2003:311) dalam Ilmu Ekonomi pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah kenaikan harta kekayaan karena perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.

2.1.10.2 Klasifikasi Pendapatan

Pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk, atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan ini sifatnya normal sesuai dengan tujuan dan

usaha perusahaan dan terjadinya berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatannya.

Pendapatan operasional berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Pendapatan operasional dapat diperoleh dari dua sumber:

1. Penjualan kotor yaitu semua hasil penjualan barang atau jasa sebelum dikurangi dengan potongan yang menjadi hak pembeli.
2. Penjualan bersih yaitu hasil penjualan yang sudah dikurangi dengan biaya potongan yang menjadi hak pembeli.

Sedangkan pendapatan non operasional merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu, tetapi bukan diperoleh dari kegiatan utama atau operasional perusahaan (di luar usaha pokok). Pendapatan non operasional diperoleh dari kegiatan sampingan yang bersifat insidental. Jenis pendapatan non operasional dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni:

1. Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain. Contohnya pendapatan bunga, sewa, dan royalti.
2. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva di luar barang dagangan atau hasil produksi. Contohnya penjualan surat-surat berharga dan penjualan aktiva tak berwujud.

Dalam mengatur pendapatan perusahaan, pemisahan atau pembagian sumber pendapatan sesuai dengan klasifikasi pendapatan perlu dilakukan. Hal ini memiliki tujuan agar dapat diperoleh ketepatan dalam mengambil keputusan bagi pihak eksternal perusahaan, terutama para pemakai laporan keuangan.

2.1.10.3 Proses Pendapatan

Terdapat dua konsep yang erat hubungannya dengan proses pendapatan, yakni konsep proses pembentukan pendapatan (*Earning Process*) dan proses realisasi pendapatan (*Realization Process*).

1. Proses pembentukan pendapatan (*Earnings Process*)

Proses pembentukan pendapatan (*Earning Process*) adalah suatu konsep tentang terjadinya pendapatan. Konsep ini berdasarkan pada asumsi bahwa semua kegiatan operasi yang diperlukan dalam rangka mencapai hasil akan selalu memberikan kontribusi terhadap hasil akhir pendapatan berdasarkan perbandingan biaya yang terjadi sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan produksi. Kegiatan operasi yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah kegiatan yang meliputi semua tahap kegiatan produksi, pemasaran, maupun pengumpulan piutang.

2. Proses realisasi pendapatan (*Realization Process*)

Proses realisasi pendapatan (*Realization Process*) adalah proses pendapatan yang terhimpun atau terbentuk sesudah produk selesai dikerjakan dan terjual atas kontrak penjualan. Proses realisasi pendapatan (*Realization Process*) dimulai sejak tahap terakhir kegiatan produksi yaitu pada saat barang atau jasa dikirimkan atau diserahkan kepada pelanggan. Jika kontrak penjualan mendahului produksi barang atau jasa, maka pendapatan belum dapat dikatakan terjadi karena belum terjadi proses penghimpunan pendapatan.

2.1.10.4 Penilaian Pendapatan

Untuk menyusun sebuah laporan keuangan, dibutuhkan suatu pedoman dasar penilaian untuk mengetahui berapa rupiah yang dapat diperhitungkan dan dicatat sebagai suatu transaksi serta berapa jumlah rupiah yang harus diletakkan dalam laporan keuangan.

2.1.10.5 Pengakuan Pendapatan

Secara umum, terdapat dua kriteria pendapatan yang dapat dijadikan pedoman dalam pengakuan pendapatan:

1. **Telah direalisasi (*realized*)**

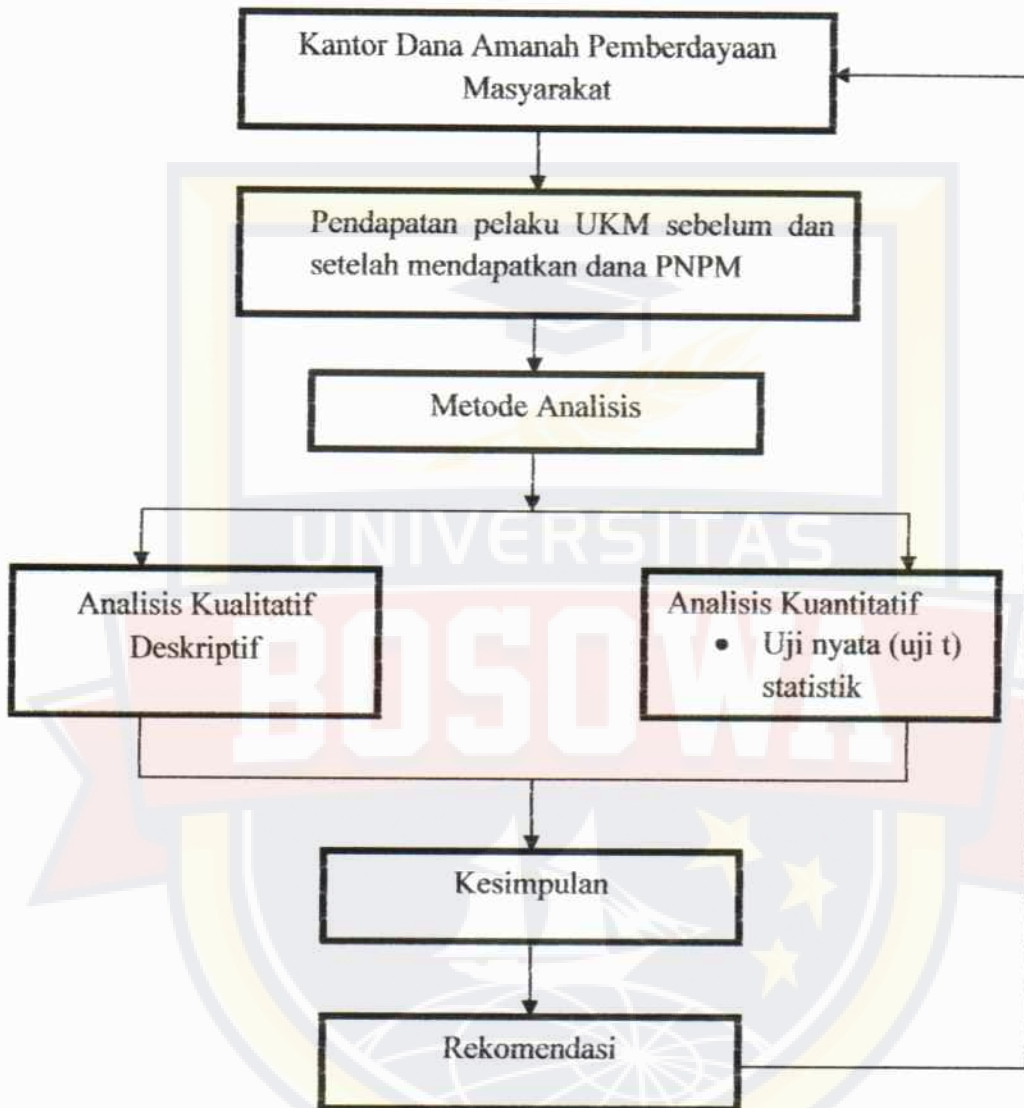
Pendapat akan diakui apabila telah terjadi transaksi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas. Dengan kata lain, pendapatan akan diakui setelah adanya kepastian akan segera terealisasi (*realizable*), dimana barang hasil pertukaran dapat segera diubah (dikonversi) menjadi kas atau klaim untuk menerima kas. Syarat barang yang mudah dikonversi adalah:

- a. Memiliki harga per unit yang pasti dan barang tersebut tidak terpengaruh oleh perubahan bentuk dan ukuran barang, misalnya emas.
- b. Mudah dijual tanpa memerlukan biaya yang besar.

2. **Pendapatan telah terbentuk**

Pendapatan akan diakui apabila kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan secara substansial telah selesai.

2.2 Kerangka Pikir



2.3 Hipotesis

Adapun hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Diduga bahwa pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri memberikan dampak yang positif terhadap pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Daerah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Alasan pemilihan lokasi ini karena di Kecamatan Bontocani adalah salah satu daerah penerima dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri terbesar se Kabupaten Bone. Lama penelitian ini berlangsung selama 3 bulan terhitung mulai bulan April-Juni 2017.

3.2 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu :

3.2.1 Penelitian Lapangan

1. Observasi

Merupakan pengamatan dan pencatatan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung (*direct observation*) dan sebagai peneliti yang menempatkan diri sebagai pengamat (*recognized outsider*) sehingga interaksi peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas.

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara adalah percakapan langsung dengan maksud untuk memperoleh informasi lebih jelas. Dengan wawancara informasi yang didapatkan oleh seseorang lebih terperinci. Selain itu, mampu bertatap muka langsung dengan pihak tersebut.

3. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan- pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Oleh karena itu, informasi yang didapatkan betul-betul akurat dan nyata.

3.2.2 Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa buku, dokumen, jurnal, koran, majalah, atau bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian penulis, dengan tujuan untuk memperoleh data yang menunjang kelengkapan penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau bukan dalam bentuk angka yang di teliti yang ada di lapangan serta mengeksploitasikan kedalam bentuk laporan.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diolah menggunakan rumus kuantitatif kemudian angka-angka perhitungan tersebut akan dideskripsikan ke dalam data kualitatif sehingga

memudahkan peneliti mengambil kesimpulan. Data kuantitatif biasanya lebih sulit dibandingkan data kualitatif.

3.3.2 Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan acuan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian, misalnya materi atau dokumen dari Kantor PNPM Kecamatan Bontocani serta melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur, majalah, serta karya tulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis.

3.4 Teknik Penentuan Sampel

Ukuran Sampel yang digunakan dalam menganalisis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah dengan menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

E : Nilai Kritis

3.5 Metode Analisis

Untuk menganalisis dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone digunakan konsep sebelum dan sesudah memperoleh bantuan program dengan analisis yang digunakan uji statistika parametrik. Dalam uji ini dipergunakan uji dua sampel berpasangan Wilcoxon untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan secara signifikan pada pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dilakukan pengujian statistik, yaitu uji beda dua rata-rata pengamatan berpasangan dengan tahapan sebagai berikut.

1.) Menentukan Hipotesis

$H_0 : d = 0$; bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri tidak berdampak terhadap peningkatan pendapatan Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

$H_1 : d > 0$; bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

2.) Menentukan uji nyata (uji t) statistik. Nata Nirwana (2002:204)

$$t = \frac{\bar{d}}{Sd/\sqrt{n}}$$

Keterangan:

d = Nilai rata-rata beda produksi pengamatan berpasangan

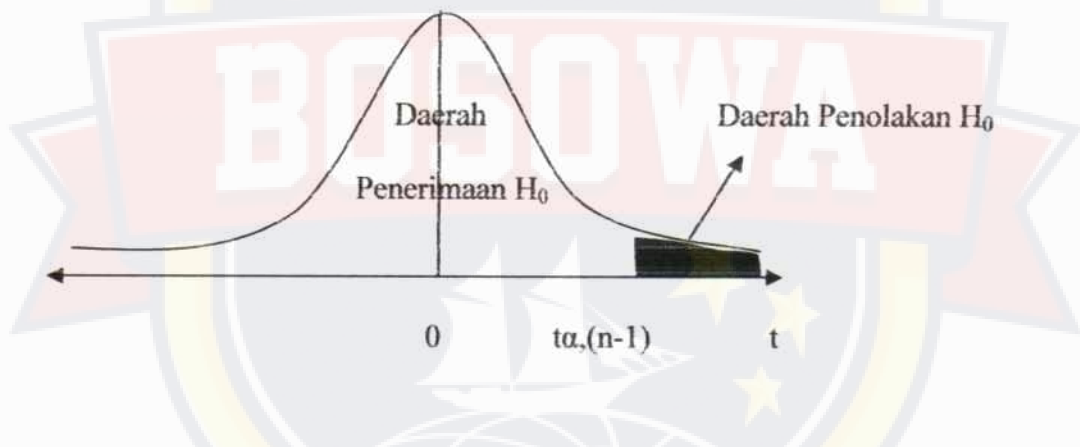
S_d = Simpangan baku beda pengamatan berpasangan (Standar deviasi) yang dapat dihitung dengan rumus.

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum(di-d)^2}{(n-1)}} \quad d = \frac{\sum di}{n}$$

d_i = beda pengamatan pasangan ke i

$df = v = (n-1)$

Tabel t yang digunakan adalah uji satu arah sisi kanan dengan level of signifikan sebesar 5 persen dan derajat bebas $n-1$. Terlihat pada gambar 3.1.



3.6 Defenisi Operasional

1. Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, merupakan salah satu kegiatan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang dalam kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.
2. Usaha Kecil dan Menengah atau UKM adalah suatu bentuk usaha kecil yang dibangun oleh masyarakat yang terbentuk atas inisiatif seseorang.

3. Daerah kritis dalam rumus ini Nilai menggunakan simbol α dengan nilai lima persen.
4. Varian dan standar deviasi (simpangan baku) adalah ukuran-ukuran keragaman (variasi) data statistik yang paling sering digunakan. Standar deviasi (simpangan baku) merupakan akar kuadrat dari varian.
5. Jumlah sampel yang digunakan di simbolkan dengan huruf n .



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Bontocani

Kecamatan Bontocani merupakan Kecamatan yang terletak di ujung paling selatan Kabupaten Bone yang berjarak sekitar 112 km dari Kota Watampone. Ibukota Kecamatan Bontocani adalah Kelurahan Kahu. Jarak Ibukota Kecamatan masing- masing Desa/Kelurahan berkisar antara 9 Km (Desa Pammusureng) hingga 48 Km (Desa Mattiro Walie). Luas wilayah Kecamatan Bontocani adalah 463,35 Km² atau sekitar 10,16 persen dari luas Kabupaten Bone. Desa terluas adalah Desa Bana sedangkan yang terkecil adalah Desa Lamoncong. Secara klimatologis, Kecamatan Bontocani terletak pada zona iklim peralihan, sebagian wilayahnya mengikuti zona barat dan sebagian lagi zona timur. Zona barat mengalami musim hujan pada bulan Oktober - Maret sedangkan zona timur mengalami musim hujan pada bulan April-September.

Batas wilayah :

- Utara : Kecamatan libureng
- Timur : Kecamatan Kahu
- Selatan : Kabupaten Sinjai dan Gowa
- Barat : Kabupaten Gowa dan Maros

Keberadaan penduduk di suatu daerah sangat penting karena penduduk merupakan modal utama pembangunan. Dengan mengetahui kondisi kependudukan, memungkinkan perencanaan pembangunan akan lebih tepat dan

terarah. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Kecamatan Bontocani tercatat 15.669 jiwa. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, maka selama kurun waktu 1 tahun, jumlah penduduk Kecamatan Bontocani bertambah sebanyak 0,35 persen. Ditinjau dari komposisi penduduk, penduduk Kecamatan Bontocani terdiri atas 7.804 laki- laki dan 7.865 perempuan. Dengan demikian, perbandingan jenis kelamin (*sex ratio*) di Kecamatan ini adalah 99,22 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 hingga 100 penduduk laki-laki.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan pertanian adalah peningkatan produktivitas dan kualitas tanaman pangan. Pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan diarahkan untuk meningkatkan produksi padi dan palawija. Peningkatan produksi padi dilakukan melalui program pencetakan sawah baru dan peralatan yang memadai. Berdasarkan grafik disamping terlihat bahwa luas lahan kering Bontocani adalah 94,92 persen (46.335 Ha) dari keseluruhan lahan, yang di dalamnya terdapat 12.701 Ha lahan pertanian kering.

Hal ini berarti sangat berpotensi untuk pembukaan lahan sawah baru yang dapat meningkatkan produksi padi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Pada tahun 2016 padi yang merupakan komoditi unggulan mengalami peningkatan yang cukup berarti yakni 8.096 ton dari tahun 2014. Begitu pula dengan komoditi lainnya mengalami peningkatan kecuali ubi kayu.

TABEL 4.1

PENDUDUK KECAMATAN BONTOCANI MENURUT DESA/KELURAHAN
TAHUN 2016

No	Desa/Kel	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Watang Cani	928	966	1.894
2	Pattuku	731	710	1.441
3	Bontojai	938	954	1.892
4.	Bulusirua	733	676	1.409
5	Bana	1.176	1.200	2.376
6	Pammusureng	641	649	1.290
7	Kahu	688	688	1.376
8	Erecinnong	473	483	956
9	Lamoncong	166	174	340
10	Mattirowalie	373	354	727
11	Langi	957	1.011	1.968
Jumlah		7.804	7.865	15.669

Sumber : Kecamatan Bontocani Dalam Angka 2016

Kabupaten Bone memiliki luas wilayah sebesar 4.559 Km², yang terdiri dari 27 Kecamatan. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Bontocani dengan presentase 10,16%, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Tanete Riattang dengan presentase 0,52%. Meskipun Bontocani merupakan kecamatan terluas, namun jumlah penduduknya tidak terlalu banyak yakni sebanyak 15.669 jiwa, hanya 2,12% dari total jumlah penduduk Bone. Kecamatan Dua Boccoe dengan luas Wilayah 144,90km² merupakan Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling banyak yaitu 21 desa dan 1 kelurahan dan Kecamatan Bontocani dengan luas wilayah 463,35 km² jumlah desa/kelurahan yaitu 10 desa

dan 1 kelurahan sementara Kecamatan Salomekko dengan luas Wilayah 84,91 km² dengan jumlah desa 7 dan 1 kelurahan.

4.2 Deskripsi Data

Kecamatan Bontocani merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan yang mendapatkan alokasi dana kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada Tahun Anggaran 2007.

Ukuran Sampel yang digunakan dalam menganalisis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Ukuran populasi (N) dalam penelitian ini adalah 492 unit usaha dan nilai kritis = 0,10(10 persen). Dengan demikian jumlah sampel yang diambil adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = 492/1+492(0,1)^2$$

$$n = 492/5,92$$

$$n = 83,10$$

$$n = 83$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah sampel adalah sebanyak 83 sampel. Selanjutnya pengambilan jumlah sampel penelitian di masing-masing desa ditentukan dengan menggunakan *Proportionate Random Sampling*.

1. Desa Langi	= $79/492 \times 83$	= 13
2. Desa Pattuku	= $29/492 \times 83$	= 5
3. Desa Bana	= $123/492 \times 83$	= 21
4. Desa Erecinnong	= $10/492 \times 83$	= 2
5. Desa Pammusureng	= $17/492 \times 83$	= 3
6. Desa Bulusirua	= $20/492 \times 83$	= 3
7. Desa Watangcani	= $20/492 \times 83$	= 3
8. Desa Bontojai	= $77/492 \times 83$	= 13
9. Kelurahan Kahu	= $117/492 \times 83$	= 20
Jumlah sampel		= 83

Untuk menganalisis dampak pemberian bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri terhadap peningkatan pendapatan Usaha Kecil Menengah dilakukan pengujian statistic sederhana. Dalam uji statistik akan diuji mengenai ada tidaknya peningkatan pendapatan keluarga sebelum atau sesudah menerima bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Selisih atau beda nilai karakteristik sebelum atau sesudah observasi akan digunakan nilai t observasi. Langkah-langkah dalam uji statistik sebagai berikut :

4.2.1 Identifikasi Responden

4.2.1.1 Umur responden

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone, maka dapat diketahui gambaran tentang identifikasi responden. Umur responden yang bergelut di bidang usaha dapat menunjang kegiatan usaha di dalam menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Semakin tinggi tingkat

umur pelaku usaha, maka semakin matang pemikirannya untuk meningkatkan kualitas usahanya.

TABEL 4.2
JUMLAH RESPONDEN MENURUT UMUR PADA USAHA KECIL
MENENGAH DI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE

No	Umur (Tahun)	Jumlah Responden	
		Orang	%
1	21-30	18	21,69
2	31-40	28	33,73
3	41-50	23	27,71
4	51-60	14	16,87
	Jumlah	83	100

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian, 2017

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 83 responden yang diteliti jumlah responden yang paling banyak berumur antara 31-40 tahun yaitu sebanyak 28 orang atau 34 persen. Sedangkan responden yang paling sedikit berumur antara 51-60 yaitu sebanyak 14 orang atau 17 persen. Responden yang berumur 21-30 tahun yaitu sebanyak 18 orang atau 21 persen. Responden yang berumue 41-50 tahun yaitu sebanyak 23 orang atau 28 persen.

4.2.1.2 Jenis Kelamin

Faktor jenis kelamin berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Tetapi dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis tidak memandang jenis kelamin seseorang yang dimiliki. Hal itu bergantung kepada pengalamannya dalam menjalankan suatu usaha.

TABEL 4.3

JUMLAH RESPONDEN MENURUT JENIS KELAMIN PADA USAHA KECIL
MENENGAH DI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	
	Orang	%
Laki-Laki	-	-
Perempuan	83	100
Jumlah	83	100

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian, 2017

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 83 orang dari 83 jumlah responden. Jadi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang menerima bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone adalah diutamakan untuk perempuan.

4.2.1.3 Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta menentukan wawasan seseorang di dalam melakukan kegiatan baik yang bersifat sosial maupun ekonomi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka orang tersebut cenderung memiliki pola pikir yang lebih baik di dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya. Namun banyak orang yang sukses dan mampu mengembangkan usaha yang dimilikinya karena banyak pengalaman yang didapatkan dari berbagai kalangan dan pihak yang berkaitan, meskipun pendidikan nya rendah . Pada tabel di bawah ini dijelaskan lebih detail mengenai tingkat pendidikan responden yang ada di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

TABEL 4.4
 JUMLAH RESPONDEN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN PADA
 USAHA KECIL MENENGAH DI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN
 BONE

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	
	Orang	%
SD	10	12,05
SMP	26	31,33
SMA	40	48,19
Sarjana	7	8,43
Jumlah	83	100

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian , 2017

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden penerima bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah sebagian besar tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 40 responden atau 48,19 dari total responden. Tingkat pendidikan SMP sebanyak 26 responden atau 31,33 persen dan tingkat pendidikan SD adalah 10 orang responden atau 12,05 persen. Sedangkan tingkat pendidikan yang paling sedikit jumlahnya adalah tingkat pendidikan sarjana yaitu sebanyak 7 orang atau 8,43 persen.

1.) Variabel input

Variabel input terdiri dari tingkat ketepatan sasaran program. Sasaran program pemberian bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone di arahkan benar-benar kepada masyarakat yang bekerja pada sektor Usaha Kecil Menengah . Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.5 .

TABEL 4.5

JAWABAN RESPONDEN TERKAIT DENGAN KETEPATAN SASARAN
 PEMBERIAN BANTUAN DANA PROGRAM NASIONAL
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DI KECAMATAN
 BONTOCANI KABUPATEN BONE

Ketepatan Sasaran	Jumlah Responden	
	Orang	%
Tepat Sasaran	83	100
Tidak Tepat Sasaran	-	-
Jumlah	83	100

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian 2017

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 83 responden yang menerima bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri terdapat 83 orang atau sebesar 100 persen yang tepat pada sasaran. Responden yang tepat sasaran adalah responden yang memiliki dan membuka usaha dan yang benar-benar mendapatkan dan menggunakan bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri sebagai penambah modal usahanya, sehingga mampu meningkatkan pendapatan di dalam menjalankan usahanya.

Dalam rangka pemberian bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perlu adanya sosialisasi atau penjelasan dari pemerintah dan petugas yang bersangkutan mengenai pengertian dan tujuan yang ingin dicapai dari pemberian bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang mana belum diberikan . Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.6 .

TABEL 4.6

JAWABAN RESPONDEN TERKAIT DENGAN ADA TIDAKNYA SOSIALISASI DARI PEMERINTAH ATAU PETUGAS KEPADA PELAKU USAHA KECIL MENENGAH DI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE.

Ada Tidaknya Sosialisasi Dari Pemerintah atau Petugas	Jumlah Responden	
	Orang	%
Ada	74	89,16
Tidak	9	10,84
Jumlah	83	100

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian, 2017

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 83 responden yaitu sebanyak 74 responden atau sebesar 89,16 persen di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone yang mendapatkan sosialisasi dari pemerintah dan petugas mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, sedangkan yang tidak mendapatkan penjelasan dari pemerintah atau petugas mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah sebanyak 9 responden atau sebesar 10,84 persen. Responden penerima bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang tidak menerima sosialisasi dari pemerintah atau petugas disebabkan karena ada beberapa responden yang pada saat pemberian sosialisasi tidak hadir. Sosialisasi diberikan pada saat rapat yang mana sebelumnya ada pemberitahuan untuk menghadiri rapat tersebut. Dan rapat diadakan di kantor Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi dalam pemberian bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

Dengan adanya sosialisasi dari pemerintah atau petugas, maka pemilik Usaha mengetahui tujuan dari diberikannya bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri untuk pemilik usaha yang memerlukan bantuan ini. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ini bertujuan untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Untuk itu pemilik usaha yang ingin mendapatkan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri diharapkan dapat mengetahui jelas tujuan diberikannya bantuan dana ini. Pada tabel 4.7 memperlihatkan jawaban responden terkait dengan pengetahuan terhadap tujuan pemberian bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

TABEL 4.7

JAWABAN RESPONDEN TERKAIT DENGAN PENGETAHUAN MEREKA TERHADAP TUJUAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE.

Pengetahuan Responden Tentang Tujuan di Berikannya Bantuan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Responden	
	Orang	%
Tahu	53	63,86
Tidak tahu	30	36,14
Jumlah	83	100

Sumber : Data diolah dari peneliti, 2017

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 83 responden maka responden yang mengetahui secara jelas tujuan diberikannya bantuan dana Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah sebanyak 53 responden atau sebesar 63,86 persen, sedangkan responden yang tidak mengetahui tujuan diberikannya bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah sebanyak 30 responden atau sebesar 36,14 persen.

2.) Variabel proses

Sesuai dengan tujuan [rogram yang telah ditetapkan dalam meningkatkan pendapatan pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone, tentulah harus disesuaikan dengan prinsip pokok yang menjadi suatu pedoman. Prinsip tersebut adalah bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata. Dengan begitu maka bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ini dialihkan untuk pengembangan usaha para pelaku Usaha Kecil Menengah guna meningkatkan pendapatannya demi kesejahteraan hidupnya.

Pemberian bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri belum tentu digunakan dengan sebaik-baiknya oleh para pelaku Usaha Kecil Menengah. Untuk itu kita dapat melihat efektif tidaknya pemberian bantuan dana tersebut di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Hal tersebut dapat dilihat dari sudut pemanfaatan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam tabel 4.8 berikut ini.

TABEL 4.8
 JAWABAN PEMANFAATAN BANTUAN DANA PROGRAM NASIONAL
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DI KECAMATAN
 BONTOCANI KABUPATEN BONE.

Pemanfaatan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Responden	
	Orang	%
Tepat	83	100
Tidak Tepat	-	-
Jumlah	83	100

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian, 2017

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 83 responden, maka responden yang menjawab mengenai ketepatan pemberian bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah sebanyak 83 responden atau sebesar 100 persen. Alasan responden menjawab tersebut karena telah diketahui sebelumnya bahwa salah satu syarat sebelum menerima bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah orang yang memiliki usaha. Dengan diberikannya bantuan tersebut dimaksudkan untuk pengembangan usaha para pelaku Usaha Kecil Menengah sehingga dengan begitu pendapatan masyarakat pun jadi meningkat.

Selama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri memberikan bantuan kepada masyarakat perlu adanya pemantauan dari pemerintah atau petugas agar kelemahan dan kelebihan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di lapangan dapat diketahui. Sehingga kalau ada permasalahan dalam pemberian bantuan dana tersebut dapat mudah dipecahkan langsung oleh pemerintah atau aparat setempat dengan baik. Untuk melihat apakah ada pemantauan dari pemerintah atau petugas setempat selama

pemberian bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini.

TABEL 4.9

JAWABAN RESPONDEN TERKAIT DENGAN ADA TIDAKNYA PEMANTAUAN DARI PEMERINTAH KEPADA PELAKU USAHA KECIL MENENGAH DI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE.

Pemantauan dari Pemerintah atau Petugas	Jumlah Responden	
	Orang	%
Ada	61	73,49
Tidak	22	26,51
Jumlah	83	100

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian, 2017

Tabel 4.9 menunjukkan dari 83 responden, jumlah responden yang menjawab tentang adanya pemantauan dari aparat pemerintah atau petugas yaitu sebanyak 61 responden atau setara dengan 73,49 persen. Sedangkan jumlah orang yang menjawab tentang tidak adanya pemantauan dari pemerintah adalah sebanyak 22 responden atau setara dengan 26,51 persen.

Berdasarkan informasi dan keterangan responden yang didapatkan bahwa meskipun ada pemantauan oleh pemerintah yang didapatkan langsung, hanya saja tidak rutin karena terkadang pada saat pemantauan memang pemilik usaha tidak berada di lokasi.

TABEL 4.10

JAWABAN RESPONDEN TERKAIT DENGAN ADA TIDAKNYA
TANGGAPAN DARI PEMERINTAH TERHADAP KELUHAN
MASYARAKAT YANG MENERIMA BANTUAN DANA DARI PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DI
KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE.

Respon dari Pemerintah/Petugas terhadap Keluhan Penerima Bantuan Dana	Jumlah Responden	
	Orang	%
Ada	78	93,98
Tidak	5	6,02
jumlah	83	100

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian, 2017

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 83 jumlah responden, maka responden yang menjawab tentang adanya tanggapan dari pemerintah atau petugas adalah sebanyak 78 responden atau setara dengan 93,98 persen. Sedangkan jumlah responden yang menjawab tidak adanya tanggapan dari pemerintah atau petugas terhadap keluhan masyarakat penerima bantuan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah sebanyak 5 responden atau setara dengan 6,02 persen.

3.) Variabel Output

Sesuai dengan tujuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam

pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. Untuk melihat efektif tidaknya apa yang dilakukan oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dapat dilihat pada tabel 4.11 tentang jawaban responden mengenai pendapatan mereka apakah mengalami penurunan atau kenaikan setelah mendapat bantuan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

TABEL 4.11

JAWABAN RESPONDEN TERKAIT DENGAN MENINGKAT ATAU MENURUNNYA PENDAPATAN SETELAH MENERIMA BANTUAN DANA DARI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE.

Jawaban Responden Mengenai Pendapatannya	Jumlah Responden	
	Orang	%
Meningkat	83	100
Menurun	-	-
Jumlah	83	100

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian, 2017.

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 83 jumlah responden, maka responden yang menjawab adanya peningkatan pendapatan mereka adalah sebanyak 83 responden atau setara dengan 100 persen.

Pemberian bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk melihat jawaban responden mengenai jumlah pendapatan yang diterima sebelum dan sesudah menerima bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri terdapat pada tabel 4.12 berikut ini.

TABEL 4.12

JAWABAN RESPONDEN TERKAIT DENGAN TINGKAT PENDAPATAN SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA BANTUAN DARI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE.

Klarifikasi Pendapatan (Rupiah)	Sebelum		Sesudah	
	Jmlh Responden	Persen	Jmlh Responden	Persen
< 1 juta	10	12,05	0	0
1 - <2 juta	35	42,17	30	36,14
2 - < 3 juta	21	25,30	17	20,48
3 - < 4 juta	9	10,84	12	14,46
4 - < 5 juta	3	3,61	10	12,05
5 - < 6 juta	3	3,61	6	7,23
6 - < 7 juta	2	2,41	5	6,02
7 juta >	0	0	3	3,61
Jumlah	83	100	83	100

Sumber : Data diolah dari penelitian. 2017.

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa dari 83 responden yang menerima bantuan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri sebanyak 9 responden yang berpenghasilan 3 juta sampai kurang dari 4 juta atau sebesar 10,84 persen meningkat menjadi menjadi 12 responden atau 14,46 persen menyatakan bahwa pendapatan mereka meningkat setelah mendapatkan bantuan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Sebanyak 3 responden atau 3,61 persen yang berpenghasilan 4 juta sampai kurang dari 5 juta meningkat menjadi 10 responden atau setara dengan 12,05 persen. Untuk penghasilan 6 juta sampai kurang dari 7 juta jumlah responden pun meningkat dari yang sebelum menerima bantuan sebanyak 2 responden atau 2,41 persen

setelah menerima bantuan berubah menjadi 5 responden atau setara dengan 6,02 persen. Sedangkan untuk penghasilan 7 juta lebih jumlah responden dari yang sebelum menerima bantuan tidak ada menjawab dan setelah menerima bantuan meningkat menjadi 3 responden atau setara dengan 3,61 persen.

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa dari 83 responden tidak ada yang berpendapat bahwa pendapatan mereka telah menurun sejak adanya bantuan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Justru responden menjawab bahwa pendapatan mereka meningkat dan sangat bersyukur dan apresiasi terhadap program pemerintah yang memperhatikan masyarakat untuk memberikan kesempatan mengembangkan usaha yang mereka miliki. Dengan adanya bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan modal usaha untuk pengembangan usahanya dan syarat untuk mendapatkannya pun sangat mudah.

4.2.2 Analisis Uji Peningkatan Pendapatan Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah Setelah Menerima Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

Hipotesis menyatakan bahwa pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone khususnya pendapatan masyarakat. Selanjutnya akan diuji dengan uji beda rata-rata data berpasangan (uji t) untuk mengetahui keberadaannya dengan tahap-tahap pengujian sebagai berikut.

1) Rumusan hipotesis

$H_0 : \mu_d = 0$ yang berarti bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri tidak berdampak terhadap pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

$H_1 : \mu_d > 0$ yang berarti bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri berdampak positif terhadap pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

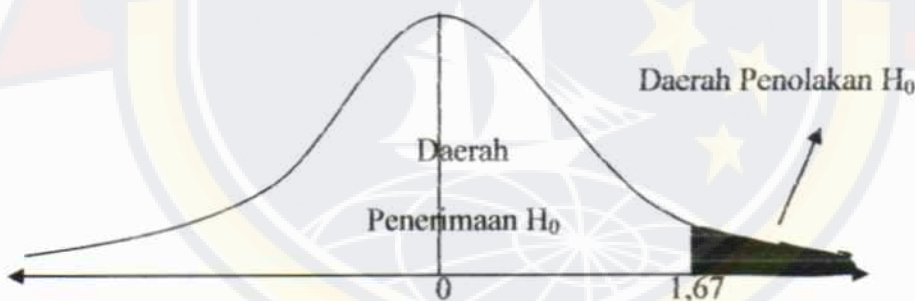
Menentukan taraf nyata, $\alpha = 5 \text{ persen} = 0,05$

2) Menentukan statistik uji dan daerah kritis

a. Statistik uji, $t_0 = \frac{\bar{d}}{sd/\sqrt{n}}$

b. Daerah kritis $\alpha = 5 \text{ persen}$, $df = n - 1 = 82$. Nilai $t_{\text{tabel}} = 1,67$

Jadi daerah kritisnya adalah sebelah kanan $t = 1,67$



Gambar 4.1 Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Nol terhadap Pendapatan UKM

3) Menghitung nilai statistik uji, t_0 (pada lampiran 5)

$$t_0 = \frac{\bar{d}}{sd/\sqrt{n}} = \frac{1054,22}{629,07/\sqrt{83}} = 15,27$$

4) Simpulan

Oleh karena nilai t_{hitung} yaitu 15,27 > dari nilai t_{tabel} yaitu 1,67 maka H_0 di tolak sebaliknya H_1 diterima yang berarti bahwa program bantuan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab IV, selanjutnya ditarik kesimpulan hasil penelitian yaitu program bantuan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas selanjutnya dikemukakan saran-saran sebagai berikut.

- 1). Kebijakan Pemerintah berupa pemberian modal usaha yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri berupa dana bergulir diharapkan dapat terus dilakukan karena kegiatan ini sudah dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun diharapkan masyarakat yang menerima pinjaman dapat memanfaatkan pinjaman dengan baik.
- 2). Kepada pemerintah dan petugas yang bersangkutan dengan program ini, diharapkan lebih memperhatikan keluhan-keluhan dari masyarakat penerima bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri . Hal ini disebabkan karena apabila para pelaku Usaha Kecil Menengah tidak mendapatkan respon yang baik dari pemerintah, maka pemilik usaha tersebut akan kesulitan dalam menjalankan usahanya sebab tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk perkembangan usahanya guna meningkatkan pendapatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- HAW. Widjaja, (2008). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Kwartono Adi, 2007. *Analisis Usaha Kecil Dan Menengah*, Penerbit CV. Andi Offset, Yogyakarta
- Mubarak, Z. 2010. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan. Tesis. Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota*. Undip. Semarang.
- Nata. Wirawan. 2002. *Cara Mudah Memahami Statistik Ekonomi 2*. Keraras Emas. Denpasar.
- Primiana, Ina. 2009. *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri*. Alfabeta. Bandung.
- Suarja, Wayan. 2007. *Kebijakan Pemberdayaan UKM Dan Koperasi Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan*. IPB .Bogor.
- Suharmawijaya., Dadang S., dkk, 2007. *Memantau Daerah Menyemai Kemajuan (Otonomi Daerah dan Otonomi Award di Jawa Timur)*, diterbitkan oleh Jawa Pos Institute of Pro Otonomi.

Suharto , Edi.2009. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta.Bandung

Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat* . PT. Alex Media Komputindo. Jakarta.

Sumaryadi, I Nyoman. 2007 *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Citra Utama. Jakarta

Zulkarnaen, 2006, *Kewirausahaan, Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Penduduk Miskin*, Adicita Karya Nusa,Yogyakarta.

Website

PNPM Mandiri Perdesaan, 2007 (<http://www.pnpm-mandiri.org/>) diakses 03 Maret 2017.

LAMPIRAN

BUSUWA



Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

**ANALISIS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI TERHADAP PELAKU USAHA KECIL MENENGAH DI
KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE**

I. a. Identitas Responden

1. Nama Responden :
2. Alamat Responden :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
5. Pendidikan :
 - a. SD
 - b. SMP
 - c. SMA
 - d. Perguruan Tinggi
6. Agama
 - a. Islam
 - b. Hindu
 - c. Kristen Protestan
 - d. Kristen Khatolik
 - e. Budha
7. Status Kewarganegaraan
 - a. WNI
 - b. WNA
8. Status dalam Rumah Tangga
 - a. Kepala Keluarga
 - b. Anggota Keluarga

II. a. Karakteristik Usaha

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha :
3. Lama Usaha :
4. Jumlah pegawai :
5. Omzet dalam sebulan :
6. Cara penjualan :

III. a Input

1. Apakah usaha yang anda jalankan termasuk dalam Usaha Kecil Menengah ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah sebelum diberikan bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Bapak/Ibu/Saudara diberikan sosialisasi tata cara pemberiannya?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah bapak/ibu/saudara mengetahui secara jelas tujuan diberikannya pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dari pemerintah yang bersangkutan?
 - a. Tahu
 - b. Tidak Tahu

III. b. Proses

1. Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang Bapak/Ibu/Saudara terima, apakah seluruhnya digunakan untuk modal tambahan usaha, atau ada digunakan untuk modal diluar usaha yang anda miliki?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah setelah Bapak/Ibu/Saudara menerima bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, terdapat kegiatan monitoring oleh petugas?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah selama Bapak/Ibu/Saudara menggunakan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pernah mendapat pembinaan dari petugas yang bersangkutan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

III. c Output/Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara bagaimanakah pendapatan usaha anda setelah menerima dan menggunakan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat?
 - a. Menurun
 - b. Tetap
 - c. Meningkatkan

IV. Pendapatan

1. Pendapatan Bapak/Ibu/Saudara sebelum menerima bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat: Rp.....
2. Pendapatan Bapak/Ibu/Saudara setelah menerima bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat: Rp.....



Lampiran 2**REKAPITULASI DATA POKOK RESPONDEN MENURUT ALAMAT, UMUR,
JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN**

No	Nama Responden	Alamat/ Desa	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Ramintang	Bana	38	Perempuan	SD
2	Bahria	Bana	55	Perempuan	SMP
3	Salmawati	Bana	40	Perempuan	SMP
4	Wahida	Bana	43	Perempuan	SMP
5	Rosmiati	Bana	34	Perempuan	SMA
6	Herlina	Bana	28	Perempuan	SMA
7	Darma	Bana	41	Perempuan	SMA
8	A.Erni	Bana	34	Perempuan	SD
9	A.Nursia	Bana	48	Perempuan	SMA
10	A.Murni	Bana	43	Perempuan	SMA
11	A.Oce	Bana	52	Perempuan	SMA
12	Sia	Bana	40	Perempuan	SMA
13	A.Enti	Bana	43	Perempuan	SD
14	A.Marni	Bana	56	Perempuan	SD
15	Sartina	Bana	29	Perempuan	SMP
16	Suwarti	Bana	41	Perempuan	SMP
17	Ernawati	Bana	35	Perempuan	SMP
18	Badrawati	Bana	21	Perempuan	SMA
19	Rosmini	Bana	45	Perempuan	SMA
20	Masriani	Bana	25	Perempuan	SD
21	Hale	Bana	52	Perempuan	SD
22	Rosdianah	Pattuku	43	Perempuan	SMA
23	A.Rosmini	Pattuku	39	Perempuan	SD
24	Humrah	Pattuku	55	Perempuan	SMP
25	Nurlina	Pattuku	38	Perempuan	SMA
26	Maryam	Pattuku	50	Perempuan	SMA
27	Ratna	Langi	35	Perempuan	SMP

Lanjutan Lampiran 2

28	Mardiana	Langi	31	Perempuan	SMA
29	Syamsia	Langi	45	Perempuan	SD
30	Sawira M	Langi	26	Perempuan	Sarjana
31	Darmiati	Langi	33	Perempuan	SMA
32	Asniar	Langi	38	Perempuan	SMP
33	Marhuma	Langi	50	Perempuan	SMP
34	Muliati	Langi	41	Perempuan	SMA
35	Nisbah	Langi	40	Perempuan	Sarjana
36	Hasna	Langi	48	Perempuan	SD
37	Asia	Langi	51	Perempuan	SMA
38	Sawira Toni	Langi	35	Perempuan	SMA
39	Kismawati	Langi	45	Perempuan	SMP
40	Hasnah	Pammusureng	45	Perempuan	SMA
41	Rosmi	Pammusureng	43	Perempuan	SMA
42	Nani P	Pammusureng	28	Perempuan	SD
43	Andi Farida	Bontojai	40	Perempuan	SMA
44	Ratna	Bontojai	42	Perempuan	SMP
45	Mukmin	Bontojai	52	Perempuan	SMP
46	Ramda. R	Bontojai	37	Perempuan	SMP
47	A.Rahmi E	Bontojai	24	Perempuan	SMP
48	Lisa	Bontojai	30	Perempuan	SMA
49	A.Hasni	Bontojai	47	Perempuan	SMA
50	Husni	Bontojai	44	Perempuan	Sarjana
51	Ernawati	Bontojai	21	Perempuan	SMA
52	Marni	Bontojai	30	Perempuan	SMP
53	Andi Tuo	Bontojai	54	Perempuan	SMA
54	Suriani	Bontojai	43	Perempuan	SMA
55	Nurhayati	Bontojai	47	Perempuan	SMA
56	Hasniati	Bulusirua	23	Perempuan	SMP

Lanjutan Lampiran 2

57	Ani	Bulusirua	38	Perempuan	SMP
58	Asia	Bulusirua	42	Perempuan	SMP
59	Rawiah	Kelurahan Kahu	42	Perempuan	SMP
60	Jumriani	Kelurahan Kahu	30	Perempuan	SMP
61	Nurhayati	Kelurahan Kahu	32	Perempuan	SMA
62	Asriani	Kelurahan Kahu	24	Perempuan	SMA
63	Kemba	Kelurahan Kahu	58	Perempuan	Sarjana
64	Jumarni	Kelurahan Kahu	30	Perempuan	SMP
65	Kasma	Kelurahan Kahu	42	Perempuan	SMA
66	Jumiati	Kelurahan Kahu	36	Perempuan	SMA
67	Musdalipa	Kelurahan Kahu	39	Perempuan	Sarjana
68	Siskawati	Kelurahan Kahu	29	Perempuan	Sarjana
69	Nadiah	Kelurahan Kahu	32	Perempuan	SMA
70	Sutriani	Kelurahan Kahu	39	Perempuan	SMA
71	Sumarni	Kelurahan Kahu	26	Perempuan	SMP
72	Hayati	Kelurahan Kahu	51	Perempuan	SMA
73	Mariati	Kelurahan Kahu	33	Perempuan	SMA
74	Asniar	Kelurahan Kahu	26	Perempuan	SMP
75	Nursina	Kelurahan Kahu	57	Perempuan	SMA
76	Ramlah	Kelurahan Kahu	52	Perempuan	SMA
77	Murni	Kelurahan Kahu	51	Perempuan	SMA
78	Radiah	Kelurahan Kahu	36	Perempuan	SMA
79	Rosmiati	Watangcani	39	Perempuan	Sarjana
80	Sukaena	Watangcani	27	Perempuan	SMA
81	Norma	Watangcani	27	Perempuan	SMA
82	Sukmawati	Erecinnong	33	Perempuan	SMP
83	Fitriani	Erecinnong	29	Perempuan	SMP

Lampiran 3

JENIS USAHA PELAKU USAHA KECIL MENENGAH DI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE

No	Nama	Jenis Usaha
1.	Ramintang	Jual pakaian jadi
2	Bahria	Pulsa
3	Salmawati	Bahan bangunan
4	Wahida	Hasil bumi
5	Rosmiati	Penjahit
6	Herlina	Jual campuran
7	Darma	Jual di Pasar
8	A.Erni	Jual ATK
9	A.Nursia	Pedagang Beras
10	A.Murni	Gula Merah
11	A.Occ	Bengkel
12	Sia	Bisnis online
13	A.Enti	Ayam potong
14	A.Marni	Jual di pasar
15	Sartina	Pulsa
16	Suwarti	Hasil bumi
17	Ernawati	Jual madu
18	Badrawati	Barang campuran
19	Rosmini	Barang campuran
20	Masriani	Pulsa
21	Hale	Jual beli hasil Bumi
22	Rosdianah	Bisnis online
23	A.Rosmini	Bahan ATK
24	Humrah	Gula merah
25	Nurlina	Hasil bumi

Lanjutan Lampiran 3

26	Maryam	Pakaian jadi
27	Ratna	Jual di pasar
28	Mardiana	Jual ATK
29	Syamsia	Bisnis online
30	Sawira Mahmud	Pakaian jadi
31	Darmiati	Jual madu
32	Asniar	Barang campuran
33	Marhuma	Gula merah
34	Muliati	Bahan rumah tangga
35	Nisbah	Barang campuran
36	Hasna	Bengkel
37	Asia	Jual ATK
38	Sawira Toni	Bahan bangunan
39	Kismawati	Hasil bumi
40	Hasnah	Jual di Pasar
41	Rosmi	Barang campuran
42	Nani Paraswaty	Jual beli kayu
43	Andi Farida	Warkop
44	Ratna	Pulsa
45	Mukmin	Barang campuran
46	Ramda. R	Jual di pasar
47	A.Rahmi Ekawati	Pakaian jadi
48	Lisa	Gula merah
49	A.Hasni	Pakaian jadi
50	Husni	Ayam potong
51	Ernawati	Alat rumah tangga
52	Marni	Barang campuran
53	Andi Tuo	Bisnis online
54	Suriani	Hasil bumi

Lanjutan Lampiran 3

55	Nurhayati	Jual beli beras
56	Hasniati	Bisnis online
57	Ani	Ayam potong
58	Asia	Pulsa
59	Rawiah	Barang campuran
60	Jumriani	Barang campuran
61	Nurhayati	Pulsa
62	Asriani	Alat rumah tangga
63	Kemba	Hasil bumi
64	Jumarni	Barang campuran
65	Kasma	Gula merah
66	Jumiati	Bahan Bangunan
67	Musdalipa	Hasil bumi
68	Siskawati	Jual beli kayu
69	Nadiah	Jual madu
70	Sutriani	Warkop
71	Sumarni	Barang campuran
72	Hayati	Barang campuran
73	Mariati	Hasil bumi
74	Asniar	Pakaian jadi
75	Nursina	Pedagang beras
76	Ramlah	Bisnis online
77	Murni	Hasil bumi
78	Radiah	Barang campuran
79	Rosmiati	Jual di Pasar
80	Sukaena	bengkel
81	Norma	Bengkel
82	Sukmawati	Pulsa
83	Fitriani	Warkop

Lampiran 4**PENDAPATAN PELAKU USAHA KECIL MENENGAH SEBELUM DAN
SESUDAH MENERIMA BANTUAN DANA DI KECAMATAN
BONTOCANI KABUPATEN BONE**

No	Nama	Sebelum Terima Dana (Ribuan Rp)	Setelah Terima Dana (Ribuan Rp)	d_i	$(d_i - d)^2$
1.	Ramintang	1200	1900	700	125471.81
2	Bahria	800	1200	400	428003.81
3	Salmawati	4100	5500	1400	119563.81
4	Wahida	2200	3300	1100	21251.808
5	Rosmiati	850	1500	650	163393.81
6	Herlina	1250	1900	650	163393.81
7	Darma	1500	1850	350	495925.81
8	A.Erni	1100	2500	1400	119563.81
9	A.Nursia	2800	3700	900	23783.808
10	A.Murni	1400	2100	700	125471.81
11	A.Oce	2000	3000	1000	2939.8084
12	Sia	2000	3100	1100	21251.808
13	A.Enti	2100	3200	1100	21251.808
14	A.Marni	1500	2500	1000	2939.8084
15	Sartina	900	1500	600	206315.81
16	Suwarti	2300	3400	1100	21251.808
17	Ernawati	1900	2600	700	125471.81
18	Badrawati	3000	5000	2000	894499.81
19	Rosmini	1200	1750	550	254237.81
20	Masriani	800	1400	600	206315.81
21	Hale	4000	7200	3200	4604371.8
22	Rosdianah	1300	1900	600	206315.81
23	A.Rosmini	2200	2900	700	125471.81
24	Humrah	1100	1800	700	125471.81
25	Nurlina	4300	5600	1300	60407.808
26	Maryam	2000	3100	1100	21251.808
27	Ratna	1500	2200	700	125471.81
28	Mardiana	2000	3150	1150	9173.8084
29	Syamsia	1500	2800	1300	60407.808
30	Sawira M	2000	3000	1000	2939.8084

Lanjutan Lampiran 4

31	Darmiati	2200	3000	800	64627.808
32	Asniar	1600	2100	500	307159.81
33	Marhuma	900	1800	900	23783.808
34	Muliati	3500	7100	3600	6480995.8
35	Nisbah	1300	1950	650	163393.81
36	Hasna	2000	3100	1100	21251.808
37	Asia	1500	2300	800	64627.808
38	Sawira Toni	5000	6000	1000	2939.8084
39	Kismawati	3000	5000	2000	894499.81
40	Hasnah	1100	1800	700	125471.81
41	Rosmi	1300	2000	700	125471.81
42	Nani Paraswaty	3000	4000	1000	2939.8084
43	Andi Farida	1100	1850	750	92549.808
44	Ratna	950	1600	650	163393.81
45	Mukmin	1200	1600	400	428003.81
46	Ramda. R	1200	1800	600	206315.81
47	A.Rahmi E	1200	1800	600	206315.81
48	Lisa	900	1700	600	206315.81
49	A.Hasni	2000	3000	1000	2939.8084
50	Husni	1900	2500	600	206315.81
51	Ernawati	2150	4100	1950	802421.81
52	Marni	2000	4000	2000	894499.81
53	Andi Tuo	1200	1800	600	206315.81
54	Suriani	3000	4200	1200	21251.808
55	Nurhayati	3500	6000	2500	2090279.8
56	Hasniati	1800	2500	700	125471.81
57	Ani	2000	4000	2000	894499.81
58	Asia	950	1700	750	92549.808

Lanjutan lampiran 4

59	Rawiah	1950	2400	450	365081.81
60	Jumriani	1900	2700	800	64627.808
61	Nurhayati	1200	1900	700	125471.81
62	Asriani	1100	1900	800	64627.808
63	Kemba	6000	7000	1000	2939.8084
64	Jumarni	2000	2950	950	10861.808
65	Kasma	1200	1850	650	163393.81
66	Jumiati	6000	6700	700	125471.81
67	Musdalipa	1900	2800	900	23783.808
68	Siskawati	5000	6000	1000	2939.8084
69	Nadiah	2100	4000	1900	715343.81
70	Sutriani	1100	1900	800	64627.808
71	Sumarni	2000	5000	3000	3786059.8
72	Hayati	1200	1900	700	125471.81
73	Mariati	1200	1800	600	206315.81
74	Asniar	1600	2700	1100	21251.808
75	Nursina	3100	4300	1200	21251.808
76	Ramlah	2200	4000	1800	556187.81
77	Murni	5000	6000	1000	2939.8084
78	Radiah	3000	5000	2000	894499.81
79	Rosmiati	1200	1950	750	92549.808
80	Sukaena	2100	4100	2000	894499.81
81	Norma	3100	4000	900	23783.808
82	Sukmawati	750	1600	850	41705.808
83	Fitriani	750	1300	550	254237.81
Jumlah		168900	256600	87500	32450116.12

Lampiran 5

PERHITUNGAN DAMPAK PEMBERIAN BANTUAN DANA DARI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI TERHADAP PELAKU USAHA KECIL MENENGAH DI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE

Statistik uji untuk pengujian beda rata-rata berpasangan adalah :

$$t_0 = \frac{\bar{d}}{Sd/\sqrt{n}}$$

Menghitung nilai statistik uji:

$$d = \frac{\sum di}{n} = \frac{87.500}{83} = 1054,22$$

$$S_d^2 = \frac{\sum(di-d)^2}{n-1} = \frac{32450116,12}{82} = 395.733$$

$$Sd = \sqrt{S_d^2} = 629,07$$

$$t_0 = \frac{\bar{d}}{Sd/\sqrt{n}}$$

Maka,

$$t_0 = \frac{\bar{d}}{Sd/\sqrt{n}} = \frac{1054,22}{629,07/\sqrt{83}} = 15,27$$

9	
9	
50	
74	
289	
206	
7125	
7045	
16967	
16890	
16815	
3.16741	
3.16669	
3.16598	
3.16528	
3.16460	
3.16392	
3.16326	
3.16262	
3.16198	
3.16135	
3.16074	
3.16013	
3.15954	